

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Abiyyu Pangestu *¹

Andreas Soi Hawi ²

M. Raihan Basuki ³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

*e-mail: pangestuabiyyu023@gmail.com¹, 63220420@bsi.ac.id², 63220322@bsi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap mutu laporan keuangan lembaga pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Tata Kelola yang baik, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, dianggap sebagai dasar yang sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan dan berkualitas. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada studi literatur, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahun anggaran 2022 yang sudah diaudit, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lebih tinggi tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan semakin baik. Hal ini terlihat dari pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima, efektivitas anggaran, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaporan. Walaupun begitu, masalah seperti kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya pengawasan internal tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik secara keseluruhan. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam sektor publik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Efisiensi, *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Transparansi.

Abstract

This research aims to evaluate the impact the application of good government's principles on the quality of financial reports of local government agencies in the provinces. Set good management, that includes the principle of transparency, accounting, participation, and efficiency, is considered a very important basis in compiling reliable and quality financial reports. By applying a qualitative descriptive approach that focuses on literature studies, The study used secondary data that included 2022 budget year's audited financial report, as well as relevant scientific sources. Research finds indicate that the level of application of good government principles is higher, Then the quality of the county's financial reports will also get better. This is seen in fair opinion with no exception (wtp) accepted, budget effectiveness, as well as participation in interest in planning and reporting. However, problems such as the lack of human resources and the lack of internal control remain major obstacles to the implementation of good governance as a whole. The study is expected to contribute to enhancing accountability and financial transparency in a public sector.

Keywords: Accountability, efficiency, good governance, the quality of the report, the regional government, transpiration.

PENDAHULUAN

Pengelolaan finansial di sektor publik pada tingkat pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam memastikan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem desentralisasi fiskal yang dianut Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran publik. Laporan keuangan yang baik tidak hanya menjadi indikator transparansi fiskal, tetapi juga mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) telah diimplementasikan secara nyata dalam setiap aktivitas birokrasi (Suwardjono, 2016).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetap menjadi isu yang penting, terutama saat masyarakat meminta keterbukaan dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 menyediakan landasan untuk menyusun laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan (Purwasih, 2023). Namun, pemenuhan karakteristik ini sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan *Good Governance* melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Keuangan Negara. Peraturan ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan cara yang teratur, efisien, hemat, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Namun, dalam praktiknya, implementasi *Good Governance* di daerah belum merata. Beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas SDM, budaya birokrasi yang belum mendukung transparansi, serta lemahnya sistem pengawasan internal.

Provinsi Lampung menjadi salah satu contoh menarik untuk dikaji karena memiliki berbagai dinamika dalam tata kelola keuangannya. Penelitian ini mencoba untuk menggali bagaimana penerapan *Good Governance* di instansi pemerintah daerah Lampung, serta apakah penerapan ini mempengaruhi mutu laporan keuangan yang disusun.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis secara mendalam tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh lembaga pemerintah daerah yang berada di Provinsi Lampung. Fokus kajian ini tidak hanya terletak pada sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan secara konkret dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga pada pengaruh nyata yang ditimbulkan oleh penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kualitas data yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam rangka memperkuat sistem akuntabilitas serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik, khususnya pada lingkup pemerintahan daerah..

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, penelitian ini berfokus pada laporan keuangan yang sudah diaudit serta sumber-sumber ilmiah yang terkait. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi mengenai pentingnya implementasi prinsip *Good Governance* dalam rangka mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, sekaligus memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi penguatan sistem pengelolaan keuangan publik di Indonesia (Muslimah, 2024). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lengkap tentang hubungan antara penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Temuan ini diharapkan tidak hanya bersifat informatif secara akademis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem pelaporan keuangan serta memperkuat praktik pengelolaan pemerintahan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan fokus pada peningkatan kinerja publik di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Menurut pandangan dari United Nations Development Programme (UNDP), Bank Dunia, dan United Nations Convention on Human Rights, konsep *Good Governance* merupakan suatu sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar interaksi yang harmonis antara sektor pemerintah, masyarakat sipil, serta pelaku usaha/swasta dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem ini bertumpu pada prinsip-prinsip utama seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, keadilan, serta demokrasi sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks nasional, prinsip-prinsip tersebut

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, yang berfungsi sebagai acuan standar umum dalam pelaksanaan *Good Governance*. Adapun UNDP mendefinisikan *Good Governance* sebagai proses penggunaan kekuasaan dalam aspek ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan negara di berbagai level pemerintahan, dengan tujuan utama membangun integrasi sosial, memperkuat kohesi, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. World Bank mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah cara sebuah negara menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya ekonomi dan sosialnya. Menurut Kemenkeu 2023, ada beberapa prinsip: undang-undang, partisipasi, transparansi, orientasi consensus, responsif, efisiensi, efektif, dan akuntabilitas (Isna, Rizki, Shangra, Silmy, & Ivan, 2024).

a. Rule Of Law

Menurut Prinsip-prinsip *Good Governance* yang dibuat oleh Program Pembangunan Internasional pada tahun 1997, penegakkan hukum berarti bahwa sistem yang ada harus adil serta dipatuhi. Dalam hal ini mengindikasikan terkait setiap aparatur negara wajib menjalankan tugas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Peran Masyarakat

Berdasarkan laporan dari *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1997, partisipasi masyarakat mencerminkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam memberikan suara dalam pemilihan umum serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif. Partisipasi ini juga mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam aktivitas pemerintahan, yang menunjukkan adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

c. Transparansi

Pada tahun 1997, Program Pembangunan Dunia (UNDP) menyatakan bahwa transparansi berarti bahwa pemerintahan harus dibangun dengan orang-orang yang membutuhkannya dapat berkomunikasi secara bebas dengan informasi.

d. Consensus Orientation

Menurut pengertiannya, Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu mengelola dan menyelesaikan konflik atau perbedaan secara adil dan bijaksana, sebagaimana diungkapkan oleh *oleh* Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1997.

e. Responsive

Responsivitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik merupakan salah satu prinsip kunci dalam konsep *Good Governance*. Sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik yang diungkapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997, responsivitas mencerminkan kemampuan penyelenggara negara untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, berarti bahwa setiap lembaga harus berusaha untuk melayani masyarakat, atau pihak yang berkepentingan.

f. Equity

Pemerintahan yang baik dan berkeadilan berarti memberikan layanan tanpa diskriminasi. Pada tahun 1997, badan program pembangunan PBB menyatakan, keadilan berarti memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa membedakan gender. Layanan publik yang sama diberikan secara adil tanpa membedakan suku, ras, agama, tingkat sosial, atau gender, menurut pengertian tersebut.

g. Akuntabilitas

Pemerintah bertanggung jawab atas akuntabilitas kepada masyarakat umum. Salah satu prinsip pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Pada tahun 1997, UNDP, badan program pembangunan PBB, menyatakan bahwa akuntabilitas berarti bahwa pemimpin pemerintah dapat bertanggung jawab kepada masyarakat.

h. Efisien dan Efektif

Untuk meningkatkan pelayanan, prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan. Menurut Program Pembangunan PBB tahun 1997, efektivitas serta efisiensi berarti setiap aktivitas serta operasi diatur untuk menghasilkan sesuatu yang sangat penting.

i. Visi Strategis

Menurut Program Pembangunan PBB (UNDP), badan program pembangunan PBB yang didirikan pada tahun 1997, prinsip terakhir dari Tata Kelola yang Baik adalah visi yang strategis. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin serta masyarakat memiliki pandangan yang luas dan berjangka panjang mengenai cara menjalankan pemerintahan dan pembangunan manusia yang efektif (Isna, Rizki, Shangra, Silmy, & Ivan, 2024).

Kualitas Laporan Keuangan

Output akhir dari proses akuntansi di tingkat PPKD adalah laporan keuangan, yang merupakan dokumen yang terstruktur mengenai situasi keuangan dan kegiatan transaksi yang dilaksanakan oleh entitas yang melaporkan. Kualitas laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menyajikan data keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Menurut (Suwardjono, 2016), kualitas laporan keuangan merujuk pada sejauh mana informasi yang ada dalam laporan tersebut dapat dipercaya, relevan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan, sehingga memberikan keuntungan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat kriteria utama yang berkualitas (Purwasih, 2023):

- a. Relevan: Laporan keuangan harus memberikan informasi yang relevan dan mampu membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi dengan memberikan bantuan dalam menilai kejadian yang telah berlangsung, saat ini, atau yang mungkin terjadi di masa mendatang.
- b. Terpercaya: Informasi yang disajikan harus akurat dan dapat diandalkan sebagai representasi yang benar dari data.
- c. Jelas dan Mudah Dipahami: Informasi disampaikan secara jelas dan ringkas, sehingga individu yang memahami dunia bisnis dan aktivitas ekonomi dapat mengerti dengan baik.
- d. Dapat Dibandingkan: Pengguna harus dapat menemukan pola dalam kinerja dan kondisi keuangan dengan membandingkan laporan keuangan dari waktu yang berbeda serta dari berbagai perusahaan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Beberapa faktor yang memengaruhi mutu laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Signifikansi Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Penerapan SAK yang tepat dan konsisten dapat memperbaiki relevansi, keakuratan, dan kemampuan perbandingan informasi keuangan.
- b. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterampilan SDM dalam menerapkan asas akuntansi sangat berperan dalam kualitas laporan keuangan (Muslimah, 2024).
- c. Sistem Pengendalian Internal: Sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan keakuratan, relevansi, dan kemampuan perbandingan informasi keuangan (Ramdany, 2021).
- d. Penggunaan Teknologi Informasi: Penerapan teknologi informasi dapat membuat proses akuntansi menjadi lebih efisien dan tepat (Sari, 2022).

Pentingnya Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang akurat memiliki banyak manfaat, seperti:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Pengguna

Laporan keuangan yang berkualitas tinggi meningkatkan transparansi dan kepercayaan karena meningkatkan keakuratan, relevansi, keandalan, dan kejelasan informasi, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih rasional (Arsal, Nur, Rosyada, & Tiara, 2025).

- b. Mendukung Pengambilan Keputusan

Peraturan tahunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menetapkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan data keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk keperluan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal (Imam, 2018).

- c. Memenuhi Kewajiban Hukum dan Regulasi

Selama periode pelaporan, laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan semua transaksi dan posisi keuangan mereka. Kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik dapat dinilai dengan data ini (Toyyib, 2022).

Sistem Pengendalian Internal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengendalian intern dipahami sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan oleh seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan, untuk memastikan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian sasaran organisasi. Sasaran tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan dengan cara yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku (Rahmadani, 2023).

METODE

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang dipakai dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data maupun pengungkapan fenomena yang ada (Tabupook & Ika, 2024). Studi ini menerapkan pendekatan penelitian melalui studi literatur. Studi literatur berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek penelitian. Laporan keuangan dari Pemerintah Daerah Lampung untuk tahun 2022, yang diaudit pada tahun 2023, merupakan sebuah contoh yang diambil. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang sudah diterbitkan dalam bentuk laporan penelitian, buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen resmi lainnya. Studi literatur diterapkan dalam penelitian ini guna membangun kerangka teoritis yang solid, mengidentifikasi variasi dalam literatur, dan mendasari kesimpulan dan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Studi ini mengindikasikan bahwa mutu laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja keuangan, antara lain:

- Rasio belanja operasi terhadap total belanja mencapai 81,12%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji pegawai serta belanja barang maupun jasa.
- Rasio belanja modal terhadap total belanja hanya sebesar 18,87%, yang mengindikasikan alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur masih terbatas.
- Rasio ekuitas terhadap total aset berada di angka 92,27%, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pemerintah daerah dibiayai secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada utang.

1) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	$\begin{aligned} &\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} \\ &= \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \\ &= \frac{4.407.709.739.253,61}{5.433.259.123.211,94} \\ &= 81,12\% \end{aligned}$

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Lampung Tahun 2022

Gambar 1. Rasio Belanja Operasi

2) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	=	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$
	=	$\frac{1.025.325.883.958,33}{5.433.259.123.211,94}$
	=	18,87%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Lampung Tahun 2022

Gambar 2. Rasio Belanja Modal

3) Rasio Ekuitas terhadap Total Aset

Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset	=	$\frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$
	=	$\frac{11.333.275.750.041,06}{12.282.486.030.358,34}$
	=	92,27%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Lampung Tahun 2022

Gambar 3. Rasio Ekuitas

Selain itu, sesuai dengan aturan akuntansi pemerintah yang berbasis akrual dan ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Dokumen ini telah ditelaah oleh Lembaga Audit Keuangan. Laporan keuangan adalah cara pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas pelaksanaan APBD. Indikator utama yang dapat dicermati dari laporan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 5,05%, meningkat dari tahun sebelumnya.
- Rasio belanja terhadap pendapatan menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
- Opini dari BPK atas laporan keuangan mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian yang menunjukkan kualitas pelaporan yang baik.

Dari sisi implementasi prinsip *Good Governance*, Provinsi Lampung telah menekankan transparansi dan akuntabilitas, tercermin dari:

- Peningkatan kualitas laporan yang sistematis dan terukur.
- Penyampaian informasi publik melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran.

Pembahasan

Hasil laporan keuangan Provinsi Lampung menunjukkan hubungan yang kuat pada penerapan *Good Governance* dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan teori yang dijelaskan dalam bagian kajian pustaka, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh implementasi prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi.

Opini WTP dari BPK menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan Provinsi Lampung telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks *Good Governance*, opini WTP menunjukkan:

- a. Adanya pengendalian internal yang memadai.
- b. Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual yang konsisten.
- c. Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Governance* dipengaruhi oleh mutu laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung. Laporan keuangan yang penting dan dapat dipercaya harus bersifat transparan, bertanggung jawab, dan efisien. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan, seperti:

- a. Kesulitan bagi SKPD untuk memahami sistem keuangan berbasis akrual.
- b. Keterbatasan anggaran untuk instruksi dan pelatihan akuntansi teknis untuk aparatur pemerintah

Selanjutnya, data makroekonomi yang mendukung, seperti pertumbuhan PDRB dan peningkatan investasi daerah, juga menunjukkan efek positif dari tata kelola keuangan yang baik terhadap kinerja fiskal dan pembangunan daerah. Meski demikian, secara umum, Provinsi Lampung telah mampu mempertahankan kinerja keuangan yang cukup sehat. Rasio ekuitas yang tinggi menunjukkan kemampuan pembiayaan mandiri yang kuat, dan tingkat realisasi anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan (97,71%) dan infrastruktur (92,62%) menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

Meskipun laporan keuangan disusun sesuai prinsip serta kebijakan yang ditetapkan, efektivitas pelaksanaan prinsip *Good Governance* masih harus diperkuat, seperti peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntansi pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan internal di seluruh unit kerja, serta peningkatan budaya transparansi birokrasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Halim, 2020; Arifianto & Isgiyarta, 2021) yang menekankan bahwa kualitas tata kelola organisasi mempunyai pengaruh penting pada kualitas pelaporan keuangan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik memberikan dampak yang besar terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keterbukaan, dan efisiensi telah diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, yang tercermin dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran 2022.

Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual menunjukkan situasi keuangan yang stabil dan sehat. Hal ini tercermin dari tingginya rasio ekuitas terhadap total aset, yang mencapai 92,27%, serta pencapaian realisasi anggaran yang efektif di berbagai sektor utama. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* tetap menghadapi kesulitan, terutama karena terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia, serta lemahnya fungsi pengawasan internal di beberapa unit organisasi.

Secara umum, temuan dari penelitian ini menunjukkan betapa krusialnya penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif sebagai perhatian utama untuk meningkatkan mutu laporan keuangan pada pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar Pemerintah Provinsi Lampung ke depan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui program pelatihan serta bimbingan teknis yang berkelanjutan mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pengawasan internal, salah satunya dengan memaksimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas atas seluruh aktivitas

keuangan daerah. Dalam rangka memperkuat transparansi, pemerintah daerah juga disarankan untuk membuka akses publik terhadap laporan keuangan, salah satunya melalui pemanfaatan platform digital agar informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Evaluasi rutin atas implementasi prinsip *Good Governance* juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Sebagai langkah akhir, untuk memastikan laporan keuangan disusun dengan akurat, relevan, dan tepat waktu, penting untuk meningkatkan kerjasama antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama proses penyusunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsal, M., Nur, E., Rosyada, H., & Tiara, A. (2025). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KEPUTUSAN. *Creative Commons (Attribution-ShareAlike 4.0 International)*, 94.
- Imam, A. M. (2018). *BPKAD KOTA BEKASI*. Diambil kembali dari Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Desentralisasi Fiskal: https://bpkad.bekasikota.go.id/blogs/akuntansi/peran-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-dalam-pengambilan-kebijakan-desentralisasi-fiskal?utm_source=chatgpt.com
- Isna, P. N., Rizki, D. R., Shangra, M., Silmy, P. M., & Ivan, D. (2024). Analisis Prinsip Good Governance terhadap Pemerintah Provinsi. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 58-59.
- Muslimah, L. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 921.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Programme, U. N. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Purwasih, R. (2023). Perkembangan Terkini Riset Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 34.
- Rahmadani, D. P. (2023). PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4.
- Ramdany, S. Y. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. *JURNAL AKUNTANSI*, 148.
- Sari, K. T. (2022). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*. Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tabupook, A. A., & Ika, W. (2024). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 2400.
- Toyyib, M. (2022, November 18). *Aksi News*. Diambil kembali dari Upaya Menilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah: <https://aksinews.id/2022/11/18/upaya-menilai-kualitas-pengelolaan-keuangan-daerah/>